

BAB III

GAMBARAN UMUM HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA

Meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang menimbulkan tuntutan kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar. Sebagian besar negara sedang berkembang memiliki permasalahan di dalam pembiayaan pembangunan seperti keterbatasan akumulasi kapital, rendahnya produktivitas juga karena tingginya tingkat konsumsi baik untuk sektor swasta maupun pemerintah.

Di sisi lain, pembiayaan pembangunan yang dihimpun dari potensi dalam negeri disadari belum dapat mencukupi untuk membiayai pembangunan. Potensi-potensi yang sebenarnya banyak terkandung di dalam negeri belum sepenuhnya digali dikarenakan keterbatasan kemampuan akan sumber daya manusia atau *skill* yang belum memadai. Masih menggantungkan dari sektor migas sebagai sumber pembiayaan yang pada akhirnya jumlahnya kian menipis. Ketergantungan kepada pihak asing masih sangat dominan tercermin dalam bentuk pembiayaan pembangunan dimana modal asing dan hutang luar negeri sangat memainkan peranan penting.

Sementara itu usaha-usaha pembangunan yang telah dicapai sekarang ini perlu terus dilanjutkan agar arah dan tujuan pembangunan yang telah direncanakan tidak terganggu, maka pemerintah masih memandang perlu adanya dana bantuan atau pinjaman luar negeri. Pemanfaatan pinjaman luar negeri ini

pada dasarnya untuk membantu meningkatkan kemampuan ekonomi nasional dalam melaksanakan pembangunan seperti yang telah direncanakan.

3.1. Perkembangan Hutang Luar Negeri Indonesia¹⁷⁾

Struktur hutang luar negeri Indonesia telah mengalami banyak perubahan selama tiga puluh tahun terakhir. Pada awalnya, sebagai negara yang baru berkembang, hutang luar negeri Indonesia lebih banyak dilakukan oleh pemerintah (Tabel 3.1)

Gambar 3.1

Jenis dan Sumber Pembiayaan

Penerimaan Dana	Sumber Dana Pemerintah (Bilateral dan Multilateral)	Swasta
Pemerintah	Hibah Pinjaman lunak → Pinjaman setengah lunak	Pinjaman komersial Obligasi ↓
Swasta	Hibah Pinjaman → Modal	Hibah Pinjaman komersial Pinjaman Modal Langsung Investasi lainnya

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1998/1999

Pinjaman pemerintah tersebut diterima dalam bentuk hibah serta pinjaman lunak dan setengah lunak dari negara-negara sahabat dan lembaga

¹⁷⁾ Bank Indonesia, *Laporan Tahun 1998. 1999*, hal. 57

supranasional, baik secara bilateral maupun multilateral dalam kerangka IGGI/CGI. Dengan berkembangnya perekonomian Indonesia, pinjaman yang bersyarat lunak menjadi semakin terbatas sehingga pemerintah (untuk keperluan-keperluan tertentu dan dalam jumlah terbatas) mulai menggunakan pinjaman komersil dan obligasi dari kreditur swasta Internasional. Selanjutnya, dengan semakin pesatnya pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah, peran swasta dalam perekonomian semakin meningkat. Hal ini berkaitan erat dengan langkah-langkah deregulasi di berbagai bidang yang ditempuh pemerintah, terutama sejak tahun 1980-an. Besarnya minat investasi swasta, sementara sumber-sumber dana dalam negeri masih terbatas, telah mendorong pihak swasta untuk melakukan pinjaman ke luar negeri, baik dalam bentuk penanaman modal langsung dan pinjaman komersial maupun investasi portofolio dalam surat-surat berharga yang diterbitkan oleh swasta domestik. Persyaratan pinjaman luar negeri swasta, baik suku bunga maupun jangka waktu pada umumnya tidak lunak.

Perubahan struktur hutang Indonesia (yang semula didominasi hutang pemerintah menjadi didominasi hutang swasta) semakin jelas dalam perkembangan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 1993/1994, sekitar dua pertiga dari total hutang luar negeri Indonesia sebesar US\$ 83,3 milyar merupakan hutang pemerintah dan sisanya merupakan hutang swasta (Tabel 3.1). Pada tahun 1997/1998, hutang swasta telah mencapai sekitar 59% sedangkan hutang pemerintah hanya 41% dari keseluruhan hutang luar negeri Indonesia sebesar US\$ 131,5 milyar. Selama periode tersebut hutang swasta

meningkat pesat rata-rata sebesar 28,6% per tahun sementara hutang pemerintah hanya tumbuh rata-rata 0,4% per tahun.

Tabel 3.1
Posisi Hutang Luar Negeri Indonesia¹⁾
(dalam juta \$)

Uraian	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998*
1. Pemerintah	55.036,9	62.569,1	58.610,0	52.635,1	54.159,0 ²⁾
- ODA	39.232,3	44.487,4	42.236,0	36.736,4	37.853,0
- Non ODA	13.491,9	16.375,1	15.345,0	14.910,8	14.632,1
- Komersial	2.312,7	1.706,6	1.029,0	987,9	1.673,9
2. Swasta	28.261,2	38.708,9	47.845,1	60.507,8	77.306,4
- Bank	8.206,8	9.017,2	8.930,9	9.622,0	12.826,2
- Non Bank	20.054,4	29.691,7	38.914,2	50.885,8	64.480,2
Total	83.298,1	101.278,0	106.455,1	113.142,9	131.465,4

¹⁾ Tidak termasuk surat berharga

²⁾ Termasuk bantuan IMF US\$ 3,0 milyar

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1998/1999

Sejalan dengan itu, dalam periode yang sama, *Debt Service Ratio* (DSR) swasta meningkat lebih dari dua kali lipat yaitu dari 12,8% menjadi 29,4%, sedangkan DSR pemerintah menurun dari 19,1% menjadi 10,2% (Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Debt Service Ratio Hutang Luar Negeri Indonesia
(dalam %)

Uraian	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998*
1. Pemerintah	19,1	17,7	16,4	14,6	10,2
2. Swasta	12,8	14,9	16,3	19,6	29,4
Total	31,9	32,6	32,7	34,2	39,6

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1998/1999

Mengingat sektor swasta mempunyai default yang lebih besar, meningkatnya beban kewajiban luar negeri tersebut menyebabkan semakin besarnya *country risk* Indonesia. Apabila dilihat menurut kelompok peminjamnya, sebagian besar hutang swasta tersebut dilakukan oleh perusahaan-perusahaan non bank yaitu PMA, PMDN dan Perusahaan lainnya. Pada tahun 1997/1998, pangsa hutang kelompok ini terhadap keseluruhan hutang swasta mencapai 83,4% sementara hutang perbankan hanya 16,6%. Tidak termasuk dalam hutang luar negeri swasta ini adalah kewajiban luar negeri lainnya yang timbul sehubungan dengan semakin maraknya penerbitan surat-surat berharga oleh perusahaan swasta nasional yang dibeli oleh investor asing, terutama sejak dua tahun terakhir.

Transaksi surat berharga ini (meliputi *certificate of deposit*, *commercial paper*, *promissory notes* dan *medium-term notes*, baik dalam denominasi rupiah maupun dolar) pada umumnya memanfaatkan perbedaan suku bunga

dalam negeri, dan karena itu sangat sensitive terhadap perubahan nilai tukar. Sebagai gambaran, krisis nilai tukar rupiah telah menyebabkan menurunnya kewajiban dalam bentuk surat-surat berharga tersebut dari US\$ 19,8 milyar pada akhir Juni 1997 menjadi hanya US\$ 6,4 milyar pada akhir tahun laporan.

3.2. Hutang Luar Negeri Swasta

Krisis nilai tukar rupiah sejak Juli 1997 tidak terlepas dari kondisi hutang luar negeri swasta Indonesia. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa serangan spekulasi terhadap nilai tukar sering terjadi pada negara yang mempunyai hutang swasta yang besar, dengan porsi hutang berjangka pendek yang meningkat pula. Inefisiensi dalam pemanfaatan hutang tersebut sebagai akibat lemahnya *corporate governance*, baik dari tingkat pemerintahan maupun perusahaan, juga mendorong timbulnya sentimen pasar yang memberikan tekanan-tekanan terhadap nilai tukar.

Selanjutnya, dengan melemahnya nilai tukar, kepanikan terjadi diantara para peminjam dalam memenuhi kewajiban hutang yang jatuh tempo atau memenuhi kewajiban yang tidak diperpanjang lagi. Kondisi seperti ini semakin memperburuk nilai tukar dan penyelesaian hutang luar negeri tersebut.

Suku bunga di luar negeri yang lebih murah, serta kepercayaan bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas kurs rupiah, menyebabkan hutang luar

negeri menjadi sumber dana yang menarik, murah dan tak banyak mengandung resiko kurs.¹⁸⁾

Ketika perusahaan swasta beramai-ramai mencari pinjaman luar negeri, pada yang sama bank-bank luar negeri berlomba mencari bisnis di Indonesia. Sebab bagi mereka Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta merupakan lahan bisnis yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Dan bank-bank ini tidak melihat beberapa kelemahan dan resiko yang memang tersembunyikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada saat yang sama pasar uang di Indonesia makin terinterasi dengan pasar uang internasional. Dengan adanya integrasi pasar uang ini, perusahaan lokal dan bank dalam negeri mempunyai akses pendanaan yang lebih baik ke pasar uang internasional. Melonjaknya hutang swasta ini (Tabel 3.3) ini bukan fenomena di Indonesia saja. Menurut *Bank for International Settlement* yang berkedudukan di Basel, Swiss, hutang luar negeri swasta di Asia Timur meningkat sepertiga menjadi US\$ 367 milyar, dalam waktu 16 bulan sampai akhir 1996. Dua pertiga hutang ini berjangka waktu kurang dari dua tahun. Dan sebagian besar tidak digunakan untuk proyek yang menghasilkan devisa, serta tidak diproteksi terhadap resiko fluktuasi kurs. Adanya ketidaksesuaian antara jangka waktu pinjaman dan masa penyelesaian proyek dianggap bukan masalah, karena pinjaman tersebut dapat diperpanjang. Begitu juga ketimpangan antara pinjaman dalam valuta asing dan penerimaan dalam rupiah dianggap masih dapat ditutup dengan cadangan devisa dan aliran

¹⁸⁾ Winarno Zain, "*Hutang Swasta*", *Upaya Memperkuat Rupiah*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998, hal. 57

modal yang terus meningkat, karena tingginya suku bunga dalam negeri. Selama otoritas moneter mempertahankan pengetatan moneter dan kurs mata uang jumlah hutang luar negeri akan meningkat terus sampai tingkat produksi berlebih mulai menekan harga serta pendapatan dan resiko kredit macet mulai dirasakan.

Tabel 3.3
Posisi Pinjaman Luar Negeri

Rincian	Posisi 31 Maret 1998		Posisi 31 Maret 1999 ¹⁾	
	Milyar \$	Pangsa (%)	Milyar \$	Pangsa (%)
Pinjaman Pemerintah	54,2	39,3	67,2	44,6
Bilateral ²⁾	33,9	24,6	38,8	25,7
Multilateral	18,5	13,4	26,0	17,2
Lainnya	1,8	1,3	2,4	1,7
Pinjaman Swasta	83,8	60,7	93,7	55,4
Jumlah	138,0	100	150,9	100

¹⁾ Data s.d Desember 1998

²⁾ Termasuk pinjaman lama dan fasilitas kredit ekspor

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 1998/1999

Sadar bahwa hutang luar negeri swasta bisa merupakan sumber gejolak, timbul pemikiran untuk mengatur (bukan membatasi) pinjaman swasta. Membatasi pinjaman swasta bisa dipandang sebagai pelanggaran aturan main pasar modal yang bebas dan penghambat proses liberalisasi

pasar finansial. Akibatnya, timbul resiko berkurangnya kepercayaan investor. Maka pemerintah harus bertindak hati-hati dan menghindari tindakan yang bisa ditafsirkan sebagai pembatasan dan campur tangan oleh investor internasional. Di lain pihak, ada kebutuhan untuk memastikan hutang swasta ini teralokasikan ke berbagai sektor secara optimal dan beban pembayaran tidak melebihi kapasitas yang menghasilkan devisa. Karena itu pengaturan pada penyaluran hutang swasta ini lebih dimungkinkan daripada pembatasan kuantitatif.

3.3. Penyelesaian Permasalahan Hutang Luar Negeri Swasta¹⁹⁾

Untuk mendorong dan memperlancar restrukturisasi hutang luar negeri swasta, pada awal tahun 1998 pemerintah dengan Kepres No. 4/1998 telah membentuk Tim Penyelesaian Utang Luar Negeri Swasta (TPULNS). Terbentuknya TPULNS menunjukkan bahwa pemerintah tetap tidak akan melakukan *bail-out* terhadap hutang luar negeri swasta. Dengan demikian, penyelesaian hutang swasta dilakukan dengan mengacu pada prinsip:

- Keikutsertaan dalam skema penyelesaian hutang bersifat sukarela
- Resiko komersial tetap dipihak kreditur
- Biaya maksimum yang mungkin dipikul oleh pemerintah dibatasi pada tingkat yang wajar
- Dukungan pemerintah hanya akan diberikan apabila ada restrukturisasi kewajiban atas dasar persyaratan minimal yang pasti dan jelas

¹⁹⁾ Bank Indonesia, *op. cit.*, hal. 60

- Adanya negoisasi antara kreditur dan debitur

Langkah awal yang dilakukan oleh TPULNS adalah melakukan pendataan terhadap hutang luar swasta yang meliputi pinjaman perusahaan swasta, pinjaman perbankan, dan pinjaman untuk membiayai perdagangan. Hal ini bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan karena belum semua perusahaan swasta yang melaporkan hutangnya dan tidak semua laporan yang ada menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Dari laporan data yang ada pada Bank Indonesia, perusahaan pengutang dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- Perusahaan yang berorientasi ekspor dan bisa membayar hutangnya
- Perusahaan yang memiliki prospek baik dan terganggu karena nilai tukar
- Perusahaan yang sama sekali tidak dapat membayar hutangnya karena kegagalan dalam penggunaan hutang yang diterima. Perusahaan kelompok ketiga ini dalam penyelesaian hutangnya diminta untuk menempuh jalur hukum dengan pihak krediturnya.

Selanjutnya untuk menjembatani proses negoisasi antara debitur dan kreditur telah dibentuk *contact commite* yang mewakili kreditur bank-bank asing di luar negeri masing-masing untuk wilayah Jepang, Amerika dan Eropa.

Tugas utama dari komite tersebut adalah melakukan pendekatan satu sama lain untuk mencari rumusan umum yang dapat diberlakukan bagi penyelesaian hutang-hutang swasta yang ikut dalam program. Dengan dibentuknya pembentukan Lembaga Penyelesaian Penjadwalan Hutang

Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency* – INDRA) merupakan salah satu pendekatan penyelesaian hutang swasta diluar perbankan dan pembiayaan perdagangan, yang mengacu pada model penyelesaian hutang “*Ficorca*” yang diterapkan di Meksiko. Pada dasarnya, model ini mengatur pengambilalihan resiko nilai tukar dari debitur karena perusahaan debitur dapat membayar angsuran pokok dan bunga dalam rupiah melalui INDRA dengan nilai tukar yang lebih menguntungkan. Kelebihan model ini adalah adanya *rescheduling* hutang berupa pemberian *grace period* maksimum selama tiga tahun untuk pembayaran pokok dan kemudahan mekanisme konversi hutang jangka pendek menjadi jangka menengah maksimum delapan tahun. Sementara itu, kesulitan yang dihadapi model ini adalah resiko komersial yang tidak ditanggung oleh INDRA.

Sementara itu, pendekatan penyelesaian terhadap hutang perbankan dan pembiayaan perdagangan didasarkan pada program penjaminan pemerintah atas kewajiban bank-bank berbadan hukum Indonesia. Sedangkan untuk perbankan, akan diupayakan untuk merundingkan penerbitan hutang baru (dengan jangka waktu yang lebih lama dan jaminan dari pemerintah) sebagai pengganti hutang-hutang yang memenuhi persyaratan. Demikian pula bank-bank kreditur luar negeri akan diminta untuk tetap meneruskan pembiayaan perdagangan dengan jaminan dari pemerintah.

3.4. Hutang Luar Negeri Sebagai Bagian dari APBN

Pembiayaan pembangunan dari sumber luar negeri sebenarnya sangat rentan dilihat dari pengamatan APBN, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem APBN kita menganut sistem anggaran berimbang, yakni menutup kesenjangan anggaran dari sumber luar negeri, sementara nilai tukar internasional senantiasa bergejolak sebagaimana naik turunnya perekonomian Internasional. Dalam perkembangannya struktur hutang luar negeri Indonesia telah mengalami banyak perubahan, karena salah dalam penggunaan prinsip anggaran berimbang yang sangat diperlukan pada masa awal Orde Baru, kini telah berubah menjadi kendala bagi pengendalian stabilitas internal dan eksternal perekonomian nasional.

Pencapaian sasaran pembangunan, memerlukan dana yang cukup besar. Penghimpunan dana pembangunan yang berasal dari dalam negeri, dilakukan melalui pembentukan tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat. Tabungan pemerintah itu sendiri merupakan selisih positif antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Pada setiap tahun anggaran, tabungan pemerintah ini diusahakan semakin besar jumlahnya sehingga akan mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar negeri. Disisi lain, penerimaan dalam negeri, khususnya dari penerimaan migas dan non migas terus diupayakan peranannya sehingga peningkatan pengeluaran rutin.

Walaupun dalam perkembangannya penerimaan dalam negeri mengalami pertumbuhan yang cukup mengesankan, tetapi nilai tersebut

hanya akan memberikan kontribusi positif terhadap tabungan pemerintah apabila disertai dengan peningkatan efisiensi penggunaan dan pengelolaannya. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan pihak luar negeri, maka kewajiban dalam pembayaran bunga dan cicilan, harus ditepati sesuai jumlah dan waktu yang telah ditetapkan.

Apabila sebelum tahun 1986 ekspor migas memegang kontribusi terbesar, maka setelah itu terjadi sebaliknya sebagai akibat turunnya harga migas. Sementara itu, volume dan jenis ekspor non migas terus meningkat, sehingga setiap tahun penerimaan ekspor non migas melebihi penerimaan ekspor migas.

Sedangkan di sisi lain jumlah hutang luar negeri juga terus meningkat sejalan dengan meningkatnya APBN. Program pembangunan, selain dibiayai dengan hutang luar negeri. Walaupun hutang luar negeri merupakan penerimaan pembangunan, tetapi pembayarannya dimasukkan ke dalam anggaran rutin. Dalam perkembangannya, hutang luar negeri merupakan bagian yang penting bagi dana pembangunan, yang penggunaannya diutamakan bagi pembangunan proyek-proyek vital, seperti sarana dan prasarana ekonomi.

Menyadari besarnya peranan hutang luar negeri pemerintah serta kebutuhan terhadap pembiayaan luar negeri di masa mendatang, pemerintah terus mengupayakan agar negara-negara kreditur dan lembaga keuangan Internasional tetap memiliki kepercayaan yang besar terhadap Indonesia. Hal ini untuk menunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan proyek-proyek

Sedangkan di sisi lain jumlah hutang luar negeri juga terus meningkat sejalan dengan meningkatnya APBN. Program pembangunan, selain dibiayai dengan hutang luar negeri. Walaupun hutang luar negeri merupakan penerimaan pembangunan, tetapi pembayarannya dimasukkan ke dalam anggaran rutin. Dalam perkembangannya, hutang luar negeri merupakan bagian yang penting bagi dana pembangunan, yang penggunaannya diutamakan bagi pembangunan proyek-proyek vital, seperti sarana dan prasarana ekonomi.

Menyadari besarnya peranan hutang luar negeri pemerintah serta kebutuhan terhadap pembiayaan luar negeri di masa mendatang, pemerintah terus mengupayakan agar negara-negara kreditur dan lembaga keuangan Internasional tetap memiliki kepercayaan yang besar terhadap Indonesia. Hal ini untuk menunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan proyek-proyek produktif sehingga nantinya dapat digunakan untuk membayar bunga dan cicilan hutang luar negeri.

Suatu pertimbangan yang penting saat memperoleh hutang luar negeri adalah mengenai skala pembayaran antara kombinasi tingkat bunga dan pokok pinjaman yang harus dibayar. Semakin lama cicilan pokok pinjaman itu dapat dibayar pada masa yang akan datang dan semakin rendah tingkat bunga akan semakin besarlah manfaat yang diterima dan kesempatan untuk membangun ekonomi negara debitur itu. Pada akhirnya, akan semakin kuatlah kapasitas dan kemampuan untuk memikul beban pinjaman tadi.

Indonesia saat ini sudah terperosok jauh ke jurang utang dan untuk keluar dari jurang tersebut bukan perkara yang mudah serta memerlukan upaya yang hati-hati, sabar, dan terencana. Keluar dari perangkap utang bukan hanya sekedar bisa melunasi utang pemerintah dan swasta, tetapi lebih jauh lagi, di dalamnya juga mengharuskan terjadinya reformasi struktural dalam perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, upaya meningkatkan tabungan menjadi sangat penting bagi upaya keluar dari perangkap utang. Selain itu, agar neraca transaksi berjalan menunjukkan angka yang sehat maka kinerja ekspor mesti ditingkatkan. Hal ini sangat terkait dengan upaya bagaimana produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif bisa muncul sebagai komoditi ekspor utama. Di dalamnya juga termasuk bagaimana pasar menjadi arena yang fair bagi semua pelaku usaha untuk bersaing satu sama lain sehingga pelaku usaha terbaiklah yang muncul ke permukaan, bukannya pelaku usaha karbitan pemburu rente seperti selama ini.

Beberapa cara yang selama ini sudah ditempuh seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*) utang merupakan cara-cara yang lunak dalam mengurangi beban utang terhadap APBN. Ada beberapa cara lain yang lebih radikal yang bisa dijalankan dan cara ini pernah sukses dijalankan negara lain yang terkena krisis, yaitu pengurangan utang. Sehingga beban pembayaran utang akan sedikit berkurang dan tidak membebani perekonomian secara keseluruhan baik neraca transaksi berjalan maupun APBN.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti: Nota Keuangan Indonesia, Laporan Bank Indonesia, Statistik Indonesia, International Monetary Funds, World Bank dan Buku-buku yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik maupun data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

Penelitian ini secara khusus merupakan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Hutang luar negeri Indonesia dengan menggunakan empat variabel yaitu Tabungan Pemerintah, Pengeluaran Pembangunan, Penerimaan sektor minyak bumi dan gas, serta Kurs Rupiah terhadap Dollar yang diasumsikan mampu menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hutang luar negeri Indonesia.

Dalam Bab ini, penulis akan melakukan pembuktian atas hipotesa yang telah dikemukakan pada Bab pertama, yaitu:

1. Tabungan Pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap Hutang luar negeri Indonesia.
2. Pengeluaran Pembangunan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Hutang luar negeri Indonesia.
3. Penerimaan minyak bumi dan gas mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap Hutang luar negeri Indonesia.

4. Kurs Rupiah terhadap Dollar mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Hutang luar negeri Indonesia.

Untuk mengkaji pertumbuhan Hutang luar negeri Indonesia, penulis mengambil data analisa dari tahun 1983 – 2001.

Tabel 4.1
Hutang Luar Negeri Indonesia dan berbagai
faktor yang mempengaruhi 1983 –2001

Tahun	Hutang luar negeri Indonesia (Milyar Rp)	Tabungan Pemerintah (Milyar Rp)	Pengeluaran Pembangunan (Milyar Rp)	Penerimaan Migas (Milyar Rp)	Kurs Rp terhadap Dollar (Rp/\$)
1983	1.204,7	5.422,0	7.359,6	8.170,4	761,80
1984	2.072,8	6.020,9	9.899,2	9.520,2	1.020,00
1985	2.737,2	6.476,5	9.951,9	10.429,9	1.053,74
1986	3.303,1	7.301,3	10.873,1	11.144,4	1.124,33
1987	5.058,1	2.581,3	8.332,0	6.337,6	1.410,81
1988	8.165,5	3.321,8	9.477,4	10.047,2	1.653,98
1989	10.862,6	2.265,3	12.250,7	9.527,0	1.712,32
1990	11.789,9	4.408,7	13.834,3	11.252,1	1.792,93
1991	13.145,1	9.548,7	19.452,0	17.711,9	1.875,57
1992	13.182,5	11.357,2	21.764,2	15.039,1	1.978,87
1993	14.942,0	13.421,3	24.134,8	15.330,4	2.037,60
1994	17.167,1	13.480,5	25.661,1	12.507,7	2.094,60
1995	17.652,3	17.386,3	27.398,3	12.851,2	2.169,00
1996	20.489,0	22.578,9	28.780,7	16.054,7	2.278,83
1997	22.120,8	25.069,2	35.951,8	20.137,1	2.346,00
1998	19.236,7	23.577,6	46.938,3	35.357,0	2.447,00
1999	64.296,3	21.902,6	92.683,0	49.711,4	14.192,00
2000	44.430,8	5.048,3	82.448,3	20.965,0	8.290,00
2001	21.609,3	56.141,5	33.362,0	24.555,0	7.300,00

Sumber: Nota Keuangan Indonesia 1999/2000

4.2. Alat Analisa yang Digunakan

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian digunakan regresi korelasi (hubungan) dan komparative (perbedaan) dan hasil pengolahan data dibantu dengan program Komputer Micro TSP.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Hutang luar negeri Indonesia adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tabungan Pemerintah, Pengeluaran Pembangunan, Penerimaan sektor minyak bumi dan gas, serta Kurs Rupiah terhadap Dolar, terhadap Hutang luar negeri Indonesia.

Untuk menganalisa dan membuktikan hipotesa-hipotesa diatas, penulis menggunakan alat analisa regresi. Keunggulan alat analisa ini dapat membantu untuk menjelaskan ataupun menggambarkan pengaruh atau keterkaitannya antara variabel dependen dan independen dalam berbagai hal, antara lain:

1. Hubungan antara variabel penjelas dan variabel yang dijelaskan secara individu atau korelasi antar variabel. Bila didepan koefisien regresi bertanda negatif (-), berarti hubungan variabel penjelas berbanding terbalik dengan variabel yang dijelaskan.

Jika variabel penjelas mengalami kenaikan atau meningkat, maka variabel yang dijelaskan akan mengalami penurunan atau disebut berkorelasi negatif.

Juga sebaliknya, jika didepan koefisien regresi bertanda positif (+), berarti hubungan variabel penjelas berbanding lurus dengan variabel

yang dijelaskan. Jika variabel penjelas mengalami kenaikan, maka variabel yang dijelaskan juga akan mengalami peningkatan atau berkorelasi positif.

2. Angka koefisien regresi menunjukkan besarnya pengaruh perilaku antara variabel dependen dengan variabel independen atau untuk mengetahui seberapa besar tingkat perubahan yang terjadi pada suatu variabel bebas.
3. Tingkat signifikansi menunjukkan tingkat kesalahan yang dapat ditolerir dalam mengolah data.
4. Adjusted R-square menunjukkan derajat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen secara bersama-sama yang ditunjukkan dengan koefisien regresi berganda.
5. Pengujian terhadap asumsi klasik.

4.3. Analisa Hasil Estimasi

Pada sub bab ini menjelaskan hasil regresi yang menguraikan hubungan antara variabel terikat (*dependent variable*) dengan variabel penjelas (*explanatory variable*) secara statistik. Prosedur analisis yang dilakukan meliputi pengujian variabel-variabel penjelas secara individu, pengujian secara serempak dengan tes penyimpangan terhadap asumsi klasik.

Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan-kesalahan dan mempermudah proses estimasi dari data yang cukup banyak, maka proses estimasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program Micro

TSP. Dari pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Regresi Hutang Luar Negeri Indonesia
1983 – 2001

Dependen Variabel LHLN					
	C	LTB	LPP	LPMG	LK
Koefisien	-0,8169236	0,2230092	0,8806731	-0,6533667	0,7264872
Standar Error	2,1657932	0,1729867	0,4307674	0,4869317	0,3548710
T-statistik	-0,3771937	1,2891699	2,0444285	-1,3418037	2,0471867
R squared	= 0,859082				
R adjusted	= 0,818820				
F-statistik	= 21,33716				
DW Tes	= 0,528017				

Sumber: Data diolah

T – tabel dengan $\alpha = 5\%$

T – tabel = $t \alpha \text{ df}(n - k)$

T – tabel = $t 0,05 \text{ df}(19 - 5)$

= $t 0,05 \text{ df}(14)$

= 1,761

F – tabel dengan $\alpha = 5\%$

F – tabel = $F \alpha \text{ df}(4, 14)$

F – tabel = $F 0,05 \text{ df}(4,14)$

= $F 0,05 \text{ df}(4,14)$

= 3,11

Keterangan:

C	= konstanta
LHLN	= Hutang luar negeri Indonesia (Milyar Rp)
LTB	= Tabungan Pemerintah (Milyar Rp)
LPP	= Pengeluaran Pembangunan (Milyar Rp)
LPMG	= Penerimaan Minyak bumi dan gas (Milyar Rp)
LK	= Kurs Rupiah terhadap Dollar (Rp/\$)

Dari tabel diatas dapat dibuat model persamaan regresi non linier sebagai berikut:

$$\text{LHLN} = -0,8169236 + 0,2230092 \text{ LTB} + 0,8806731 \text{ LPP} - 0,6533667 \text{ LPMG} + 0,7264872 \text{ LK}$$

Hasil Estimasi persamaan regresi tersebut mempunyai koefisien determinasi berganda (R^2) = 0,859082 dan koefisien determinasi yang disesuaikan (R^2 Adjusted) = 0,818820, menunjukkan bahwa tingkat ketepatan (*goodness of fit*) dari hubungan fungsi tersebut adalah 0,859082 yang artinya secara variabel output sebesar 85,90% dan sisanya 14,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

4.4. Uji Hipotesa

4.4.1. Uji-t satu sisi terhadap variabel-variabel penjelas secara Individu

Dari pengujian diatas, dapat diperoleh t_{hitung} dari masing-masing variabel penjelas seperti pada Tabel 4.3.

Pengujian “t” satu arah untuk masing-masing variabel penjelas dilakukan antara lain $t_{tabel} = t \alpha df (n - k)$

Keterangan: α = level signifikan

n = jumlah data

k = koefisien variabel

tabel 4.3

pengujian Koefisien Variabel Independen dengan Uji-t

Variabel	T_{hitung}	T_{tabel}	α	Kesimpulan
LTB	1,2891699	1,076	15%	Signifikan
LPP	2,0444285	1,761	5%	Signifikan
LPMG	-1,3418037	-1,076	15%	Signifikan
LK	2,0471867	1,761	5%	Signifikan

Sumber: Data diolah

4.4.1.1. Uji-t Terhadap variabel LTb, yaitu Tabungan Pemerintah untuk Variabel Tabungan Pemerintah

$$T_{hitung} = 1,2891699 \quad df = 14 \quad \alpha = 15\%$$

$$T_{tabel} = 1,076$$

$$T_{hitung} > T_{tabel}$$

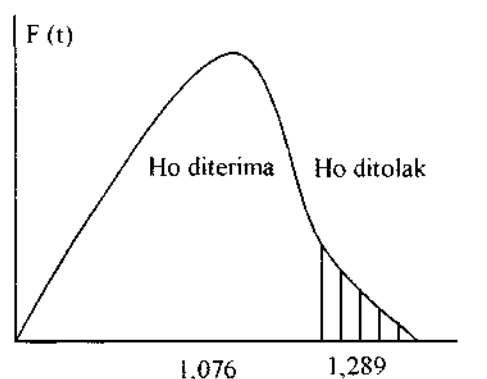
$H_0 : \beta_1 \leq 0$ Dimana variabel Tabungan Pemerintah tidak berpengaruh positif secara individu terhadap hutang luar negeri Indonesia

$H_a : \beta_1 > 0$ Dimana variabel Tabungan Pemerintah berpengaruh positif secara individu terhadap hutang luar negeri Indonesia

Karena $T_{hitung} = 1,2891699 > T_{tabel} = 1,076$ yang terletak di daerah penolakan, maka variabel Tabungan Pemerintah signifikan berdasarkan uji-t pada derajat signifikansi 15%. Berarti variabel Tabungan Pemerintah berpengaruh positif terhadap hutang luar negeri Indonesia.

Gambar 4.1

Uji-t Pada Variabel Independen Tabungan Pemerintah Terhadap Variabel Dependen Hutang Luar Negeri Indonesia



4.4.1.2. Uji-t terhadap Variabel LPP, yaitu Pengeluaran Pembangunan untuk Variabel Pengeluaran Pembangunan:

$$T_{hitung} = 2,0444285 \quad df = 14 \quad \alpha = 5\%$$

$$T_{tabel} = 1,761$$

$$T_{hitung} > T_{tabel}$$

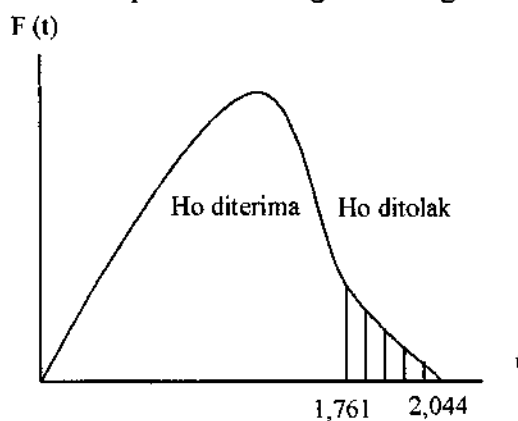
$H_0 : \beta_2 \leq 0$ Dimana variabel Pengeluaran Pembangunan tidak berpengaruh positif secara individu terhadap hutang luar negeri Indonesia

$H_a : \beta_2 > 0$ Dimana variabel Pengeluaran Pembangunan berpengaruh positif secara individu terhadap hutang luar negeri Indonesia

Karena $T_{hitung} = 2,0444285 > T_{tabel} = 1,761$ yang terletak di daerah penolakan, maka variabel Pengeluaran Pembangunan signifikan berdasarkan uji-t pada derajat signifikansi 5%. Berarti variabel Pengeluaran Pembangunan berpengaruh positif terhadap hutang luar negeri Indonesia.

Gambar 4.2

Uji-t Pada Variabel Independen Pengeluaran Pembangunan Terhadap Variabel Dependen Hutang Luar Negeri Indonesia



4.4.1.3. Uji-t Terhadap Variabel LPMG, yaitu Penerimaan Minyak Bumi dan Gas untuk Variabel Penerimaan Minyak Bumi dan Gas:

$$T_{hitung} = -1,3418037 \quad df = 14 \quad \alpha = 15\%$$

$$T_{tabel} = -1,076$$

$$T_{hitung} > T_{tabel}$$

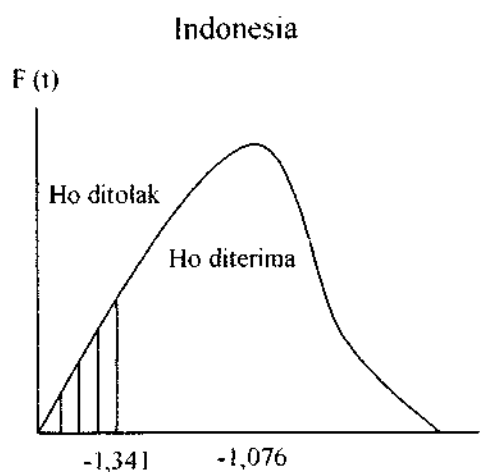
Ho : $\beta_3 \geq 0$ Dimana variabel penerimaan Minyak Bumi dan Gas tidak berpengaruh negatif secara individu terhadap hutang luar negeri Indonesia

Ha : $\beta_3 < 0$ Dimana variabel penerimaan Minyak Bumi dan Gas berpengaruh negatif secara individu terhadap hutang luar negeri Indonesia

Karena $T_{hitung} = -1,3418037 > T_{tabel} = -1,076$ yang terletak di daerah penolakan, maka variabel Penerimaan Minyak Bumi dan Gas signifikan berdasarkan uji-t pada derajat signifikansi 15%. Berarti variabel Penerimaan Minyak Bumi dan Gas berpengaruh negatif terhadap hutang luar negeri Indonesia.

Gambar 4.3

Uji-t Pada Variabel Independen Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Terhadap Variabel Dependen Hutang Luar Negeri



4.4.1.4. Uji-t Terhadap Variabel LK, yaitu Variabel Kurs Rupiah terhadap Dollar untuk Variabel Kurs Rupiah terhadap Dollar:

$$T_{hitung} = 2,0471867 \quad df = 14 \quad \alpha = 5\%$$

$$T_{tabel} = 1,761$$

$$T_{hitung} > T_{tabel}$$

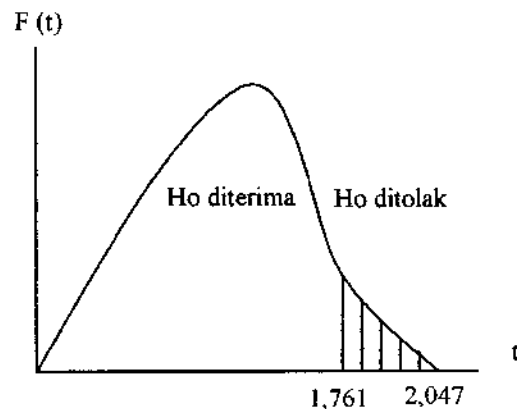
$H_0 : \beta_4 \leq 0$ Dimana variabel Kurs Rupiah terhadap Dolar tidak berpengaruh positif secara individu terhadap hutang luar negeri Indonesia

$H_a : \beta_4 > 0$ Dimana variabel Kurs Rupiah terhadap Dolar berpengaruh positif secara individu terhadap hutang luar negeri Indonesia

Karena $T_{hitung} = 2,0471867 > T_{tabel} = 1,761$ yang terletak di daerah penolakan, maka variabel Kurs Rupiah terhadap Dolar signifikan berdasarkan uji-t pada derajat signifikansi 5%. Berarti variabel Kurs Rupiah terhadap Dolar berpengaruh positif terhadap hutang luar negeri Indonesia.

Gambar 4.4

Uji-t Pada Variabel Independen Kurs Rupiah terhadap Dolar Terhadap Variabel Dependen Hutang Luar Negeri Indonesia



4.4.2. Uji-F Pada Variabel yang digunakan

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen secara serempak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Dari hasil estimasi diperoleh nilai F_{hitung} dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{SSR / (k - 1)}{SSE / (n - k)}$$

Keterangan:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ Secara bersama-sama variabel Tabungan Pemerintah, Pengeluaran Pembangunan, Penerimaan Minyak Bumi dan Gas, serta Kurs Rupiah terhadap Dollar tidak mempengaruhi besarnya variabel Hutang Luar Negeri Indonesia.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ Secara bersama-sama variabel Tabungan Pemerintah, Pengeluaran Pembangunan, Penerimaan Minyak Bumi dan Gas, serta Kurs Rupiah terhadap Dolar mempengaruhi besarnya variabel Hutang Luar Negeri Indonesia.

Uji statistik:

$$n - k = 19 - 5 = 14$$

$$k - 1 = 5 - 1 = 4$$

$$\alpha = 1\%$$

$$F_{hitung} = 21,33716$$

$$F_{tabel} = F_{\alpha \text{ df}(k-1, n-k)}$$

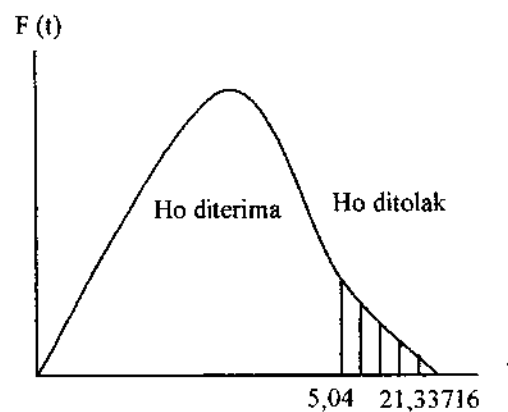
$$F_{tabel} = F_{0,01 \text{ df}(4, 14)}$$

$$F_{tabel} = 5,04$$

Karena $F_{hitung} = 21,33716 > F_{tabel} = 5,04$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti dari hasil hipotesa tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Tabungan Pemerintah, Pengeluaran Pembangunan, Penerimaan Minyak Bumi dan Gas serta Kurs Rupiah terhadap Dolar secara bersama-sama dapat mempengaruhi besarnya variabel Hutang Luar Negeri Indonesia.

Gambar 4.5

Uji-F pada Variabel-variabel Independen terhadap Variabel Dependen
Hutang Luar Negeri Indonesia



4.5. Analisa Elastisitas

Dalam analisa regresi menggunakan model non linier, hasil perhitungan elastisitas dari masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:

4.5.1. Koefisien Elastisitas Variabel Tabungan Pemerintah

Nilai koefisien elastisitas variabel Tabungan Pemerintah adalah sebesar 0,223% yang berarti bahwa setiap peningkatan variabel Tabungan Pemerintah sebesar 1% dengan anggapan *ceteris paribus*, maka akan mengakibatkan peningkatan realisasi hutang luar negeri Indonesia sebesar 0,223%.

4.5.2. Koefisien Elastisitas Variabel Pengeluaran Pembangunan

Nilai koefisien elastisitas variabel Pengeluaran Pembangunan adalah sebesar 0,880% yang berarti bahwa setiap peningkatan variabel Pengeluaran Pembangunan sebesar 1% dengan anggapan *ceteris paribus*, maka akan mengakibatkan peningkatan realisasi hutang luar negeri Indonesia sebesar 0,880%.

4.5.3. Koefisien Elastisitas Variabel Penerimaan Minyak Bumi dan Gas

Nilai koefisien elastisitas variabel Penerimaan Minyak Bumi dan Gas adalah sebesar -0,653% yang berarti bahwa setiap peningkatan variabel Penerimaan Minyak Bumi dan Gas sebesar 1% dengan anggapan *ceteris paribus*, maka akan mengakibatkan penurunan realisasi hutang luar negeri Indonesia sebesar -0,653%.

4.5.4. Koefisien Elastisitas Variabel Kurs Rupiah terhadap Dolar

Nilai koefisien elastisitas variabel Kurs Rupiah terhadap Dolar adalah sebesar 0,726% yang berarti bahwa setiap peningkatan variabel Kurs Rupiah terhadap Dolar sebesar 1% dengan anggapan

ceteris paribus, maka akan mengakibatkan peningkatan realisasi hutang luar negeri Indonesia sebesar 0,726%.

4.6 Analisa Ekonomi

4.6.1. Hubungan antara Variabel Hutang Luar Negeri Indonesia dengan Tabungan Pemerintah

Tabungan Pemerintah adalah salah satu sumber pembiayaan pembangunan di sektor pemerintah dipengaruhi oleh perkembangan penerimaan dalam negeri dan perencanaan alokasi pengeluaran rutin bagi kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Pengeralahan sumber-sumber penerimaan dalam negeri, terutama dari sektor perpajakan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha nasional, serta berbagai faktor internal dan eksternal.

Tabel 4.4
Peranan Tabungan Pemerintah terhadap
Hutang Luar Negeri Indonesia (dalam milyar Rp)

Tahun	Hutang Luar Negeri Indonesia	Tabungan Pemerintah
1983	1.204,7	5.422,0
1984	2.072,8	6.020,9
1985	2.737,2	6.476,5
1986	3.303,1	7.301,3
1987	5.058,1	2.581,3
1988	8.165,5	3.321,8
1989	10.862,6	2.265,3
1990	11.789,9	4.408,7
1991	13.145,1	9.548,7
1992	13.182,5	11.357,2
1993	14.942,0	13.421,3
1994	17.167,1	13.480,5
1995	17.652,3	17.386,3
1996	20.489,0	22.578,9
1997	22.120,8	25.069,2
1998	19.236,7	23.577,6
1999	64.296,3	21.902,6
2000	44.430,8	5.048,3
2001	21.609,3	56.141,5

Sumber: Nota keuangan Indonesia

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Tabungan Pemerintah rata-rata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hanya pada beberapa tahun terjadi penurunan, yaitu pada tahun 1987, 1989, 1999 dan 2000, tetapi pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan kembali. Kenaikan tingkat Tabungan Pemerintah tertinggi terjadi pada tahun

2001 sebesar Rp 56.141,5 milyar, sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 1989 sebesar Rp 2.265,3 milyar.

Tabungan Pemerintah belum bisa mencukupi untuk membiayai pembangunan yang dikarenakan pendanaan yang berasal dari potensi-potensi dalam negeri belum dapat digali. Selain itu, peningkatan pengeluaran rutin tidak bisa dihindari karena dilakukannya pengalihan beban subsidi bagi komoditi tertentu, seperti subsidi pupuk, serta subsidi yang lainnya yang sebelumnya ditampung dalam anggaran belanja pembangunan.

Sementara itu, akibat krisis moneter yang berkepanjangan terjadinya perubahan pada faktor-faktor eksternal yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan pasar, maka pengendalian pengeluaran rutin sulit dilakukan karena masih diperlukannya beban subsidi bagi pengadaan bahan bakar minyak dalam negeri yang cukup besar, serta untuk membayar bunga dan cicilan hutang luar negeri.

4.6.2. Hubungan antara Variabel Hutang Luar Negeri Indonesia dengan Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Pembangunan adalah pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi²⁰⁾. Pengeluaran Pembangunan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran yang bersumber dari dana rupiah murni dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan proyek.

²⁰⁾ Kunarjo, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Edisi Tiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 140

Dana pemerintah yang dipergunakan untuk pengeluaran di dalam negeri dilakukan dari sumber dalam negeri yang berupa rupiah murni yang berasal dari Tabungan Pemerintah ditambah dengan Bantuan Program.

Di lihat dari kategori penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengeluaran habis pakai dan pengeluaran transfer. Pengeluaran habis pakai adalah pengeluaran yang di pergunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang sifatnya secara langsung tidak menghasilkan return kepada pemerintah tetapi secara tidak langsung mempunyai dampak luas. Kepada pertumbuhan kemajuan perekonomian negara serta pemerataan pendapatan masyarakat. Dana ini dikelola oleh departemen menurut bidangnya masing-masing.

Proyek-proyek yang dibiayai dengan dana ini meliputi proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, kelistrikan, pertanian, pengairan, pendidikan, penelitian), pemerataan pendapatan (transmigrasi, perumahan rakyat, koperasi), peningkatan kesejahteraan masyarakat (kesehatan, kesejahteraan sosial dan keluarga berencana), program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang baik sosial maupun ekonomi (pengembangan kawasan Terpadu/PKT, Program Pengembangan Wilayah/PPW).

Sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran transfer adalah pengeluaran yang dari dana APBN yang dipergunakan untuk bantuan pembangunan daerah, penyertaan modal pemerintah dan subsidi.

Tabel 4.5

Peranan Pengeluaran Pembangunan terhadap

Hutang Luar Negeri Indonesia

(dalam milyar Rp)

Tahun	Hutang Luar Negeri Indonesia	Pengeluaran Pembangunan
1983	1.204,7	7.359,6
1984	2.072,8	9.899,2
1985	2.737,2	9.951,9
1986	3.303,1	10.873,1
1987	5.058,1	8.332,0
1988	8.165,5	9.477,4
1989	10.862,6	12.250,7
1990	11.789,9	13.834,3
1991	13.145,1	19.452,0
1992	13.182,5	21.764,2
1993	14.942,0	24.134,8
1994	17.167,1	25.661,1
1995	17.652,3	27.398,3
1996	20.489,0	28.780,7
1997	22.120,8	35.951,8
1998	19.236,7	46.938,3
1999	64.296,3	92.683,0
2000	44.430,8	82.448,3
2001	21.609,3	33.362,0

Sumber: Nota keuangan Indonesia

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Pengeluaran Pembangunan rata-rata mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 1987, 2000 dan 2001 terjadi penurunan. Kenaikan tingkat Pengeluaran Pembangunan tertinggi terjadi pada tahun 1999 sebesar Rp 92.683,0 milyar, sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 1987 sebesar Rp 8.332,0 milyar.

Pengeluaran Pembangunan yang tiap tahun mengalami peningkatan diikuti dengan peningkatan hutang luar negeri yang dikarenakan tidak mencukupinya pembiayaan yang berasal dari dalam negeri. Alternatif pembiayaan pembangunan diambil melalui pinjaman luar negeri.

Rencana anggaran belanja pembangunan disusun sebagai rencana pembiayaan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan pembangunan sektor pemerintah disusun berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan dalam Repelita dan GBHN dan diupayakan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Dalam kaitan ini, anggaran belanja pembangunan hanya akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang benar-benar efisien, melanjutkan penyelesaian proyek-proyek yang semula dijadwalkan, dan penyediaan dana pendamping bagi proyek-proyek yang pendanaannya berasal dari bantuan luar negeri.

Sementara itu, pembiayaan bagi proyek-proyek baru diprioritaskan terutama untuk menunjang upaya peningkatan

pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan memperhatikan pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup.

4.6.3. Hubungan antara Variabel Penerimaan Minyak Bumi dan Gas dengan Hutang Luar Negeri Indonesia

Penerimaan minyak bumi dan gas alam adalah penerimaan yang berasal dari kegiatan eksploitasi minyak bumi dan gas alam, termasuk penerimaan yang berasal dari bonus dan retensi. Penerimaan negara yang diperoleh dari sektor migas terdiri dari:

- Bagian pemerintah atas hasil ekspor minyak mentah yang pelaksanaan ekspornya dilakukan oleh Pertamina sendiri
- Bagian pemerintah hasil perjanjian karya dan production sharing. Pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor asing dalam hal ini berubah-ubah dan yang terakhir adalah 65,9% untuk pemerintah/Pertamina dan 34,1% untuk kontraktor asing. Khusus untuk PT. Caltex Pacific Indonesia pembagiannya 72,7% untuk pemerintah/Pertamina dan 27,3% untuk PT. Caltex Pacific Indonesia. Berdasarkan SK. Menteri Keuangan No. 267/KMK. 012/1978 menyatakan bahwa kontraktor beserta pasangan kerjanya yang melakukan kontrak production sharing di bidang pertambangan migas harus menyetorkan kewajibannya sebesar 56% dari laba kena pajak.

- Pembayaran pajak dalam valuta asing dan penyetoran-penyetoran overlapping dari kontraktor-kontraktor perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia.

Selain pajak, kontraktor berkewajiban untuk menyerahkan minyak mentah pro-rata sebesar maksimum 25% dari jumlah produksi bersih.

- Pembayaran retensi kepada Pertamina
- Penyetoran pajak bumi dan bangunan dari sektor pertambangan kepada pemerintah

Tabel 4.6
Peranan Penerimaan Minyak Bumi dan Gas terhadap
Hutang Luar Negeri Indonesia
(dalam milyar Rp)

Tahun	Hutang Luar Negeri Indonesia	Penerimaan Migas
1983	1.204,7	8.170,4
1984	2.072,8	9.520,2
1985	2.737,2	10.429,9
1986	3.303,1	11.144,4
1987	5.058,1	6.337,6
1988	8.165,5	10.047,2
1989	10.862,6	9.527,0
1990	11.789,9	11.252,1
1991	13.145,1	17.711,9
1992	13.182,5	15.039,1
1993	14.942,0	15.330,4
1994	17.167,1	12.507,7
1995	17.652,3	12.851,2
1996	20.489,0	16.054,7
1997	22.120,8	20.137,1
1998	19.236,7	35.357,0
1999	64.296,3	49.711,4
2000	44.430,8	20.965,0
2001	21.609,3	24.555,0

Sumber: Nota keuangan Indonesia

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Penerimaan Minyak Bumi dan Gas cukup mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Rata-rata penerimaan minyak bumi dan gas berkisar antara sekitar Rp 8.000 milyar sampai Rp 10.000 milyar pada dekade tahun 1983 dan 1990 dan beberapa kali melampaui angka Rp 10.000 milyar pada tahun-tahun tertentu. Walaupun penerimaan minyak bumi dan gas mengalami fluktuatif, perubahan yang kadang mengalami kenaikan atau penurunan yang cukup dratis (pada tahun 1987 mengalami penurunan sekitar 50% dari Rp 11.144,4 milyar pada tahun sebelumnya, menjadi Rp 6.337,6 milyar, kemudian meningkat kembali cukup dratis pada tahun 1988 menjadi Rp 10.047,2 milyar. Pada tahun 1989 sampai 1997 terus mengalami fluktuatif terutama pada tahun 1999 dan 2000 dimana terjadi penurunan penerimaan dari Rp 49.711,4 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp 20.965,0 milyar pada tahun 2000, tetapi tingkat hutang luar negeri Indonesia rata-rata tetap terus mengalami kenaikan.

Kenaikan tingkat penerimaan minyak bumi dan gas tertinggi terjadi pada tahun 1999 sebesar Rp 49.711,4 milyar, sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 1987 sebesar Rp 6.337,6 milyar

Dalam variabel penerimaan minyak bumi dan gas terdapat pengaruh yang besar dari faktor eksternal, yaitu pasar internasional. Penurunan harga minyak bumi dari \$ 20,7 per barel menjadi \$ 16,9 per barel, disebabkan oleh permintaan minyak bumi yang melemah

sementara pasokan yang ada di pasaran internasional meningkat sekali²¹⁾. Dewasa ini negara-negara OPEC memproduksi minyak sebesar 27 juta barel sehari, dari permintaan minyak dunia sebesar 73 juta barel sehari. Produk negara non-OPEC 48 juta barel sehari. Dengan perbandingan kekuatan produksi seperti itu, OPEC tidak lagi mempunyai kekuatan untuk menentukan harga seperti pada tahun 70-an. Ketika itu OPEC berjumlah 30 juta barel sehari, dibandingkan dengan produksi non-OPEC 18 juta barel sehari. Sekarang OPEC lebih banyak sebagai pengikut penentuan harga (*Price Follower*) dengan kemampuan produksi 37,5% dari produk dunia.

Pada sisi lain peningkatan pasokan minyak di pasaran Internasional berkaitan dengan tercapainya persetujuan antara PBB dan Irak tentang program *oil for Food* dan membanjirnya pasokan minyak dari negara-negara non-OPEC menyebabkan perubahan kuota yang dikenakan kepada Indonesia oleh OPEC dari 27,5 juta barel sehari menjadi 25 juta barel sehari. Selain itu faktor kondisi musim dingin yang melanda Eropa dan Amerika tidak terlalu buruk juga mempengaruhi permintaan minyak di pasar dunia.

Melihat kondisi tersebut, perubahan yang terjadi pada variabel penerimaan minyak bumi dan gas tidak membawa pengaruh atau belum bisa dijadikan tolak ukur terhadap seberapa besar hutang luar negeri yang akan dipinjam. Hal ini dikarenakan selain faktor-faktor

²¹⁾ Subroto, "OPEC dan Krisis Moneter", *Upaya Memperkuat Rupiah*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998, hal. 13

yang telah tertera diatas, minyak bumi tidak lagi menjadi primadona seperti pada tahun 70-an dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap OPEC dalam memproduksi minyak bumi dan gas yang disebabkan kuota yang dikenakan OPEC terhadap Indonesia.

4.6.4. Hubungan antara Variabel Kurs Rupiah terhadap Dolar dengan Variabel Hutang Luar Negeri Indonesia

Perubahan Kurs dolar yang merupakan mata uang kuat di pasar dunia sangat berpengaruh terhadap kondisi Hutang luar negeri Indonesia. Depresiasi rupiah menyebabkan peningkatan nilai hutang luar negeri dalam rupiah, walaupun nilainya dalam dolar tidak berubah. Efek dari perubahan kurs menyebabkan nilai stock hutang luar negeri menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Sedangkan untuk tiap tahunnya akan berpengaruh melalui cicilan dan pembayaran bunga yang tiap tahunnya berlaku kurs yang baru.

Tabel 4.7
Peranan Kurs Rupiah terhadap Dolar terhadap
Hutang Luar Negeri Indonesia (dalam milyar Rp)

Tahun	Hutang Luar Negeri Indonesia	Kurs Rupiah Terhadap Dolar
1983	1.204,7	761,80
1984	2.072,8	1.020,00
1985	2.737,2	1.053,74
1986	3.303,1	1.124,33
1987	5.058,1	1.410,81
1988	8.165,5	1.653,98
1989	10.862,6	1.712,32
1990	11.789,9	1.792,93
1991	13.145,1	1.875,57
1992	13.182,5	1.978,87
1993	14.942,0	2.037,60
1994	17.167,1	2.094,60
1995	17.652,3	2.169,00
1996	20.489,0	2.278,83
1997	22.120,8	2.346,00
1998	19.236,7	2.447,00
1999	64.296,3	14.192,00
2000	44.430,8	8.290,00
2001	21.609,3	7.300,00

Sumber: Nota keuangan Indonesia

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kurs rupiah terhadap dolar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi pada tahun 2000 dan 2001 terjadi penurunan. Semenjak Oktober 1978, Indonesia telah menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali, mengakhiri delapan tahun periode nilai tukar nominal tetap US\$ 1 ekual Rp 415²²⁾. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kestabilan rupiah, terutama nilai tukar riil, dalam upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekspor non migas.

²²⁾ M. Reza Y. Siregar, "Dilema Rupiah, *Upaya Memperkuat Rupiah*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998, hal. 19

Dengan mempergunakan alat analisis Natrex (*Natural Real Exchange Rate*) yang dikembangkan Jerome L. Stein dan Brown University, Amerika Serikat, dan melihat aplikasinya terhadap keadaan Indonesia saat ini, tercatat empat faktor fundamental yang menjelaskan lebih dari 90% fluktuasi kurs riil rupiah sejak tahun 1978. Faktor tersebut adalah suku bunga riil dunia, nilai tukar perdagangan (*term of trade*), tingkat tabungan nasional dan tingkat produktivitas.

Untuk Indonesia, fluktuasi dari dua faktor pertama tersebut masih sangat ditentukan oleh gejolak pasar dunia, faktor eksternal. Adapun faktor internal masih lemahnya daya saing produktivitas dan rendahnya tingkat tabungan nasional memaksa otoritas moneter terus mengintervensi pasar yang domestik secara kontinyu. Ditambah dengan fenomena ekonomi biaya tinggi. Kedua faktor internal tersebut merupakan pemicu meningkatnya kurs rupiah dan biaya produksi barang ekspor Indonesia umumnya.

4.7. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas dalam hasil estimasi, karena apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, uji-t dan uji-f yang dilakukan menjadi tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.

4.7.1. Pengujian Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya, atau dengan kata lain variabel-variabel independen yang satu merupakan fungsi dari variabel-variabel independen lainnya.

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada hubungan sempurna antara semua atau beberapa penjelas dalam model regresi yang digunakan. Dalam menguji variabel penjelas yang mana berhubungan variabel penjelas lainnya, maka dipergunakan cara meregresi tiap-tiap variabel atas sisa variabel penjelas lainnya.

Setelah dilakukan analisis regresi diantara variabel-variabel bebasnya dengan bantuan komputer sesuai dengan uji *Klein Rule of Thumb* yang dipakai dalam penelitian ini maka dapat diperoleh nilai-nilai sebagai berikut:

Tabel 4.8
Pengujian Multikolinearitas

Variabel Penjelas	r^2 variabel	R^2 keseluruhan	r^2 variabel < R^2 keseluruhan
LTB – LPP	0,241287	0,859082	Tidak terjadi Multikolinearitas
LTB – LPMG	0,277842	0,859082	Tidak terjadi Multikolinearitas
LTB – LK	0,052320	0,859085	Tidak terjadi Multikolinearitas
LPP – LPMG	0,807952	0,859085	Tidak terjadi Multikolinearitas
LPP – LK	0,781171	0,859085	Tidak terjadi Multikolinearitas
LPMG – LK	0,656315	0,859085	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah

Berdasarkan teori yang diajukan Klein yang disebut *Klein's Rule of Thumb* menyatakan bahwa Multikolinearitas tidak usah dirisaukan apabila nilai R^2 regresi model awal lebih besar daripada nilai R^2 regresi antar variabel penjelas, maka setelah dilakukan pengujian dengan bantuan komputer besarnya R^2 antar variabel penjelas (R^2_{ij}) lebih kecil daripada R^2 (koefisien determinan majemuk) atau dengan kata lain $R^2_{ij} < R^2$ LHLN LTB LPP LPMG LK, dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai $r^2 < R^2$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat Multikolinearitas dalam regresi yang dilakukan.

4.7.2. Pengujian Autokorelasi

Istilah Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Salah satu asumsi linier klasik adalah tidak terjadinya autokorelasi dalam kesalahan pengganggu atau gangguan u_i dengan menggunakan : $E(u_i, u_j) = 0 \quad i \neq j$.

Apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka estimasi OLS (*ordinary least squares*) yang diperoleh tidak lagi efisien karena selang keyakinan (*confidence interval*) akan semakin melebar. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson sebagai berikut:

$$D = \frac{\sum e_t - e_{t-1}}{\sum e_t^2}$$

Berdasarkan perhitungan komputer diperoleh hasil bahwa nilai Durbin Watson statistik adalah sebesar 1,763 yang dibandingkan dengan DW tabel pada $\alpha = 1\%$.

Nilai tabel DW untuk $d_l (\alpha; k; n) = (0,01; 4; 17) = 0,57$

Nilai tabel DW untuk $d_u (\alpha; k; n) = (0,01; 4; 17) = 1,63$

Keterangan: k = jumlah variabel independen

n = jumlah pengamatan

Hipotesis:

H_0 = Tidak ada Autokorelasi positif

H_0^* = Tidak ada Autokorelasi negatif

Dimana:

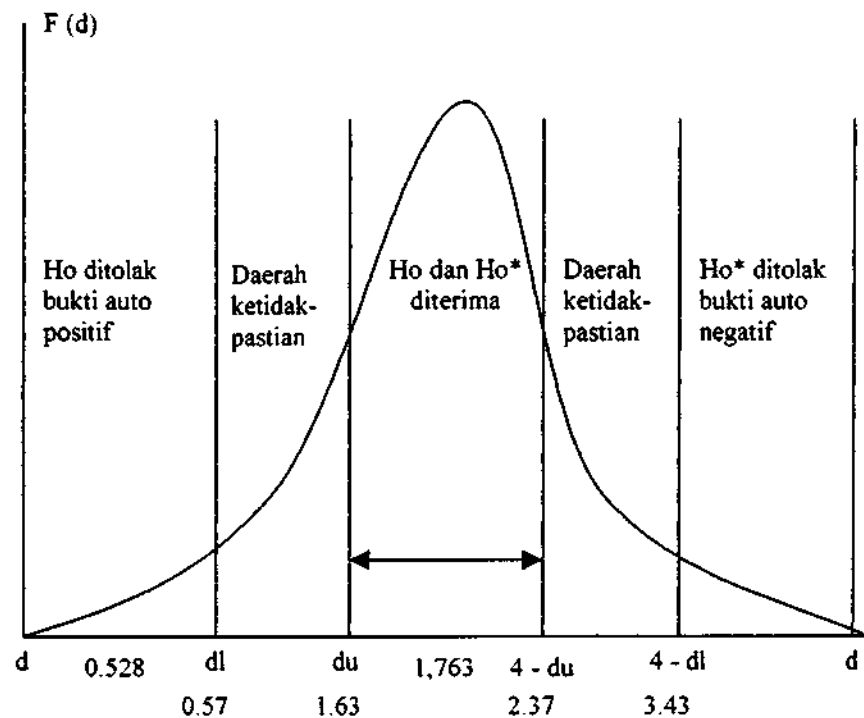
H_0 dan H_0^* berada di daerah H_0 ditolak jika $d < d_l$ dan $d > 4 - d_l$

H_0 dan H_0^* berada di daerah H_0 diterima jika $d > d_u$ dan $d < 4 - d_u$

H_0 dan H_0^* berada di daerah ketidakpastian jika $d_l \leq d \leq d_u$ dan

$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$

Gambar 4.6
Pengujian Autokorelasi



Maka dari hasil perhitungan yang diperoleh setelah meregresikan data yang ada seperti dalam lampiran diperoleh kesimpulan bahwa dalam analisa ini terdapat autokorelasi melihat nilai Durbin Watson (DW) yang diperoleh sebesar 0,528 berarti berdasarkan pengujian DW nilai d terletak pada daerah Autokorelasi, karena terletak pada $d < d_l$ atau dengan kata lain nilai DW terletak di daerah I yaitu H_0 ditolak bukti auto (+). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam analisis ini terdapat autokorelasi.

Walaupun terdapat Autokorelasi, hal ini masih bisa ditanggulangi. Autokorelasi ini diobati dengan menggunakan metode

uji LM (Likelihood maximum method) adalah metode yang mengurangi dua sampel, dari 1985 – 2001 sehingga jumlah data menjadi 17 seperti yang terlihat dalam lampiran. Dimana nilai DW bergeser sebesar 1,763 yang terletak di daerah H_0 dan H_0^* diterima. Jadi kesimpulannya tidak terdapat Autokorelasi.

4.7.3. Pengujian Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas digunakan uji Glejser. Dengan menentukan hipotesis yang menyatakan jika dari hasil perhitungan menghasilkan nilai t_{hitung} yang signifikan atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat dikatakan terdapat heterokedastisitas. Jika t_{hitung} tidak signifikan atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dapat dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas.

Dengan menggunakan $\alpha = 1\%$ dan $df = 19$ maka diperoleh $t_{tabel} = 2.539$ dan nilai t_{hitung} sebagai berikut:

- a. Nilai t_{hitung} untuk variabel LTB yaitu jumlah Tabungan Pemerintah adalah sebesar $-2,2973315$. Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa variabel LTB (Tabungan Pemerintah) tidak terjadi heterokedastisitas
- b. Nilai t_{hitung} untuk variabel LPP yaitu jumlah Pengeluaran Pembangunan adalah sebesar $-0,0490097$. Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa variabel LPP (Pengeluaran Pembangunan) tidak terjadi heterokedastisitas.

- c. Nilai t_{hitung} untuk variabel LPMG yaitu jumlah Penerimaan migas adalah sebesar 1,2146722. Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa variabel LPMG (Penerimaan Migas) tidak terjadi heterokedastisitas.
- d. Nilai t_{hitung} untuk variabel LK yaitu jumlah Kurs Rupiah terhadap dolar adalah sebesar -1,0820249. Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dapat dikatakan bahwa variabel LK (kurs rupiah terhadap dolar) tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.9

Pengujian Koefisien Variabel Independen

Dengan T-test untuk $\alpha = 0,01$

Variabel penjelas	T-test	T-tabel	Kesimpulan (T-test < T-tabel)
LTB	-2,2973315	2,539	Tidak ada heterokedastisitas
LPP	-0,0490097	2,539	Tidak ada heterokedastisitas
LPMG	1,2146722	-2,539	Tidak ada heterokedastisitas
LK	-1,0820249	2,539	Tidak ada heterokedastisitas

Sumber: Data diolah

Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka pada seluruh variabel independen yang digunakan, yaitu Tabungan Pemerintah, Pengeluaran Pembangunan, Penerimaan Minyak Bumi dan Gas serta Kurs Rupiah terhadap Dolar tidak terjadi heteroskedastisitas.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1. Simpulan

Dari berbagai uraian yang dikemukakan dimuka, berkaitan dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hutang luar negeri pemerintah di Indonesia kurun waktu 1983 – 2001, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia telah mengalami situasi apa yang disebut dengan Fisher Paradox, yaitu situasi dimana semakin banyak cicilan hutang luar negeri dilakukan semakin besar akumulasi hutang luar negerinya. Ini disebabkan cicilan hutang luar negeri ditambah bunga secara substansial dibiayai oleh hutang baru. Oleh karena nilai cicilan ditambah bunga hutang luar negeri Indonesia lebih besar daripada nilai hutang baru sehingga terjadilah apa yang disebut dengan net transfer sumber-sumber keuangan dari Indonesia ke pihak-pihak kreditor asing.
2. Pembayaran cicilan ditambah bunga cicilan hutang luar negeri yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya kelambatan pertumbuhan ekonomi karena pengeluaran pemerintah yang seharusnya ditujukan untuk investasi akan dipakai untuk membayar hutang ini.
3. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan luar negeri untuk membiayai pembangunan dikarenakan tabungan pemerintah yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan belum mencukupi

menyebabkan negara Indonesia mengarah pada *growth led debt* atau masuk perangkap hutang (*debt trap*). Bantuan luar negeri sangat membantu Indonesia untuk dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonominya. Tetapi dengan demikian Indonesia mengalami fenomena *debt led growth* atau dengan hutang luar negeri Indonesia dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sementara menurut GBHN, bantuan luar negeri hanya sebagai dana pelengkap dalam pembiayaan pembangunan nasional.

4. Melihat hasil regresi dari model yang digunakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model tersebut cukup valid dalam menjelaskan variabel yang diteliti. Pengujian terhadap koefisien determinan majemuk (R^2) yang dilakukan menghasilkan nilai yang tinggi sebesar 85,90%. Hal ini menunjukkan bahwa 85,90% variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, dan hanya 14,1% variabel dependen dipengaruhi faktor-faktor lain diluar model.

Uji-F yang diperoleh menghasilkan f_{hitung} yang jauh lebih besar dibanding f_{tabel} , yakni sebesar 21,337 untuk nilai f_{hitung} sementara f_{tabel} sebesar 5,04. Ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi perubahan variabel dependen.

- Variabel independen Tabungan Pemerintah dari hasil regresi mempunyai nilai uji-t yang signifikan dan positif atau mempengaruhi variabel hutang luar negeri. Tetapi berdasarkan hipotesa yang diambil tidak sesuai dengan hasil uji-t, karena variabel tabungan pemerintah

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan tingkat Tabungan pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar Rp 56.141,5 milyar, sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 1989 sebesar Rp 2.265,3 milyar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan tabungan pemerintah mengalami kenaikan tiap tahunnya mempengaruhi tabungan itu sendiri.

- Variabel independen Pengeluaran Pembangunan dari hasil regresi mempunyai nilai uji-t yang signifikan dan positif. Ini berarti variabel Pengeluaran Pembangunan berpengaruh positif terhadap variabel dependen, dan sesuai dengan hipotesa. Besarnya kenaikan variabel Pengeluaran Pembangunan akan mengakibatkan peningkatan terhadap variabel hutang luar negeri.
- Variabel independen Penerimaan Minyak Bumi dan Gas dari hasil regresi mempunyai nilai uji-t yang signifikan dan negatif. Ini berarti variabel Penerimaan Minyak Bumi dan Gas berpengaruh negatif terhadap variabel dependen, dan sesuai dengan hipotesa. Besarnya kenaikan variabel Penerimaan Minyak Bumi dan Gas akan mengakibatkan penurunan terhadap variabel hutang luar negeri.
- Variabel independen Kurs Rupiah terhadap dolar dari hasil regresi mempunyai nilai uji-t yang signifikan dan positif. Ini berarti variabel kurs rupiah terhadap dolar berpengaruh positif terhadap variabel dependen, dan sesuai dengan hipotesa. Besarnya kenaikan variabel

kurs rupiah terhadap dolar akan mengakibatkan peningkatan terhadap variabel hutang luar negeri.

5. Pengujian pelanggaran terhadap asumsi klasik yang dilakukan tidak ditemukan adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas, tetapi di temukannya autokorelasi namun setelah diobati tidak terkena autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi klasik.

5.2. Implikasi Kebijakan

Ketergantungan akan bantuan luar negeri untuk membiayai pembangunan sebaiknya harus diwaspadai karena keberadaan hutang luar negeri yang semakin meningkat akan membawa dampak pada perekonomian nasional dikarenakan cicilan pokok ditambah bunga hutang luar negeri yang harus dibayarkan akan semakin membengkak.

Sejak dini sudah harus dicari jalan keluar untuk pembiayaan pembangunan dengan mengandalkan potensi-potensi yang ada untuk lebih dikembangkan sehingga ketergantungan akan bantuan luar negeri dapat ditekan. Pendapatan yang berasal dari sektor non migas harus lebih digali seperti dari sektor jasa yang selama ini belum tergali, dan sektor perkebunan, hasil hutan dan pajak. Pajak merupakan sektor penyumbang terbesar dalam tabungan pemerintah harus dapat lebih dikembangkan dengan tidak mengenyampingkan kepentingan dan kemampuan masyarakat.

Untuk meringankan proses penyelesaian permasalahan hutang luar negeri, harus dilakukan kembali penjadwalan (restrukturisasi) hutang yang telah jatuh tempo. Langkah awal yang dapat diambil adalah melakukan kembali pendataan terhadap hutang yang meliputi pinjaman perbankan, pinjaman perdagangan dan pinjaman swasta. Proses restrukturisasi diharapkan akan dapat membantu menyelesaikan permasalahan hutang luar negeri.